

Evaluasi Implementasi Penanganan bencana Banjir Di Desa Lamanela Kecamatan Iteboleng Nusa Tenggara Timur

Kletus Marselinus Wurin¹⁾, Dr. Hendro Wardhono, M.Si²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo

Email: kletusmarselinuswurin@gmail.com

ABSTRAK

Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Banjir terjadi disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor alam dan faktor ulah manusia yang menyebabkan adanya korban jiwa dan kehilangan harta benda. Banjir yang terjadi di desa Lamanela Nusa Tenggara Timur merupakan suatu bencana banjir yang disebabkan oleh keadaan fenomena alam dan curah hujan yang cukup tinggi tetapi hal lain yang membuat peneliti tertarik adalah adanya kepercayaan masyarakat tentang penyebab banjir yang terjadi akibat adanya norma-norma adat yang terlarang atau disebut banjir yang disebabkan oleh hidrometeorologi dan antropologi. Kebijakan seperti tahap-tahap penanganan telah dilakukan, maka kebijakan-kebijakan penanganan banjir desa Lamanela Nusa Tenggara Timur tersebut perlu dilakukan penilaian, sehingga munculnya beberapa permasalahan yang dapat dikaji antara lain: (i) bagaimana evaluasi implementasi dalam menangani banjir yang terjadi, (ii) apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan banjir, (iii) rekomendasi atau saran yang diberikan agar penanganan banjir dapat cepat, tepat efisien dan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yakni kualitatif, untuk evaluasi menggunakan teori Dunn implementasi penangananan banjir desa Lamanela Nusa Tenggara Timur. Analisis data dalam penelitian ini meliputi evaluasi dan implementasi penanganan banjir desa Lamanela, Evaluasi mencakup efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, ketetapan dan resposivitas. Sedangkan implementasi mencakup komunikasi, sumberdaya, disposisi dan birokrasi. Pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi implemntasi penanganan banjir desa Lamanela dinilai sudah berhasil oleh sebagian besar masyarakat Lamanela karena dapat dirasakan oleh masyarakat Lamanela. Rekomendasi yang diberikan peneliti dalam penanganan banjir desa Lamanela perlu adanya komunikasi yang baik atau peningkatan kerja sama dari pemerintah desa- pemerintah pusat dan fasilitas yang harus memadai dalam penanganan banjir serta bencana lainnya yang kemungkinan dapat terjadi.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Penanganan Banjir

ABSTRACT

Flood is a natural disaster that often occurs in Indonesia. Floods occur due to 2 factors, namely natural factors and human-caused factors that cause loss of life and loss of property. The flood that occurred in the village of Lamanela, East Nusa Tenggara is a flood disaster caused by natural phenomena and high rainfall, but another thing that makes researchers interested is the existence of public trust about the causes of flooding that occur due to forbidden customary norms or customs. called floods caused by hydrometeorology and anthropologicals. Policies such as the stages of handling have been carried out, then the flood management policies in the village of Lamanela, East Nusa Tenggara need to be assessed, so that several problems arise that can be studied, including: (i) how to evaluate implementation in dealing with floods that occur, (ii) what are the supporting and inhibiting factors in dealing with floods, (iii) recommendations or suggestions given so that flood management can be fast, precise, efficient and effective. This study uses a descriptive approach, namely qualitative, for evaluation using Dunn's theory of implementing flood management in the village of Lamanela, East Nusa Tenggara. Data analysis in this study includes evaluation and implementation of flood management in Lamanela village. Evaluation includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, determination and responsiveness. Meanwhile, implementation includes communication, resources, disposition and bureaucracy. Data collection consists of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the evaluation of the implementation of flood management in Lamanela village is considered successful by most of the Lamanela community because it can be felt by the Lamanela community. Recommendations given by researchers in handling floods in Lamanela village need good communication or increased cooperation from the village government-central government and adequate facilities in handling floods and other disasters that may occur.

Keywords: Policy Evaluation, Flood Management

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang berada pada daerah khatulistiwa yang terdiri dari banyak pulau dengan keadaan lingkungan yang dapat berdampak pada dinamika iklim dan cuaca yang beragam sehingga rentan terhadap dampak dari perubahan iklim. Adanya dinamika iklim dapat menimbulkan berbagai macam bencana alam yang dapat terjadi. Bencana alam merupakan fenomena alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan kehancuran lingkungan yang pada akhirnya dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan pembangunan yang telah dibangun selama ini.

Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia umumnya adalah bencana hidrometeorologis merupakan bencana yang disebabkan oleh dinamika iklim dan cuaca. Dari data yang dihimpun Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB) (2020) terdapat 2.921 macam jenis bencana diantaranya ada 16 gempa bumi, 7 erupsi gunung api, 326 karhulta, 29 kekeringan, 570 tanah longsor, 872 puting beliung, 32 gelombang pasang atau abrasi, 1065 banjir dan 1 bencana nonalam yakni pandemi Covid-19. Akibat kejadian bencana alam tersebut sebanyak 370 orang meninggal dunia hilang 39 orang sera luka-luka 356 jiwa. Tidak hanya itu Badan Nasional

FLOTIM). Tetapi disisi lain menurut pandangan masyarakat setempat banjir yang terjadi khususnya didesa Lamanela disebabkan karena adanya sekelompok suku di desa Lamanela yang melanggar adat yaitu dengan mengambil air belerang di kawasan gunung lalu membawa menggunakan botol kerumah yang secara kepercayaan dari masyarakat setempat tidak boleh membawanya pulang yang hal ini dikuatkan karena selama tahun-tahun sebelumnya banjir tidak pernah terjadi di desa ini. Penyebab bencana ini disebut otografi yaitu bencana dapat terjadi karena norma-norma adat dilanggar.

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul tentang “Evaluasi Implementasi Penanganan Bencana Banjir di Desa Lamanela Kecamatan Iteboleng Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang akan diamati dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani banjir di Desa Lamanela Kecamatan Iteboleng?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Pemerintah dalam penanganan banjir di Desa Lamanela Kecamatan Iteboleng?
3. Bagaimana saran/ rekomendasi yang dapat dirumuskan agar implementasi penanganan banjir di Desa Lamanela kecamatan Iteboleng dapat berlangsung secara lebih cepat, tepat , efektif dan efisien?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi banjir di Desa Lamanela Nusa Tenggara Timur .

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh pemerintah dalam penanganan banjir di Desa Lamanela Nusa Tenggara Timur?
3. Dapat memberikan saran kepada pemerintah agar dapat menangani banjir yang terjadi di Desa Lamane Nusa Tenggara Timur agar lebih cepat, tepat, efektif dan efisien.

B. LANDASAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara umum merupakan suatu bentuk keputusan yang telah dipilih dan ditetapkan pemerintah untuk dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak yang diputuskan melalui bidang politik.

Menurut Sooly (2007) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya masalah-masalah tertentu yang terjadi didalam lingkungannya sehingga dengan adanya kebijakan masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan. Menurut Thomas R. Dye (2008) kebijakan publik adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan publik, masalah tersebut terdiri dari tiga kontasi didalamnya yaitu: pemerintah, masyarakat dan umum.

Secara garis besar dari pengertian diatas dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan suatu aksi yang dibuat oleh pemerintah, yang bertujuan untuk kepentingan publik yang dipertimbangkan matang-matang untuk dampak yang ditimbulkan jika kebijakan itu ada.

2. Tahap-tahap Kebijakan

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (William Dunn, 2003:22).

a) Penetapan agenda kebijakan (agenda setting)

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Perumus kebijakan harus difasilitasi berupa dukungan sosial, dukungan politik dan sosial budaya.

b) Formulasi Kebijakan

Dalam tahap formulasi kebijakan, peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu.

c) Adopsi Kebijakan

Pada tahap adopsi kebijakan, pengambil kebijakan terbantu dalam rekomendasi yang membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari

berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan.

d) Implementasi Kebijakan

Pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya terhadap pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

e) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami “apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan atau legislasi kebijakan publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa (Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, 2008:176).

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik yang merupakan rangkaian aktifitas dalam rangka mengantar kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, misalnya UU muncul sejumlah pertauran pemerintah yang menggerakkan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja siapa yang

bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut dan bagaimana mengantarkan kebijakan tersebut secara kongkrit ke masyarakat. (Gaffar, 2019:225).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan kurang dan untuk mengimplementasikan kebijakan public maka ada dua pilhan langkah yang ada yaitu langsig mengimplementasikan dalam bentuk program-program (Nugroho 2013: 139). Tahap implementasi kebijakan merupakan tahap dimana alternatif yang telah ditetapkan diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Tahap tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administratif dengan memobilisasi sumber daya yang ada. Tanpa implementasi, suatu kebijakan akan sia-sia dan hanya berupa konsep semata. Implementasi kebijakan merupakan rantai yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi berupa penerapan, penyelenggaraan, pelaksanaan, atau pengekseskuan suatu kebijakan yang telah disahkan . Dari pengertian-pengertian di atas bila dikaitkan dengan kebijakan publik adalah bahwa suatu kebijakan itu tidak hanya dibuat dan didiamkan begitu saja melainkan kebijakan itu harus diimplementasikan agar dapat mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

4. Evaluasi Kebijakan

Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010) menyatakan evaluasi kebijakan pada hakekatnya mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang

diinginkan. Evaluasi adalah Thomas R. Dye dalam Parsons (2008:547) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah “pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik”. Tepatnya ia mencatat evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Ripley (Riyanto, 1997: 35), evaluasi implementasi kebijakan adalah evaluasi yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap proses
2. Dilaksanakan dengan menambah pada perspektif apa yang terjadi selain kepatuhan
3. Dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka pendek.

Evaluasi kebijakan umumnya merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menilai suatu kebijakan yang biasanya dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi merupakan tahap terakhir didalam proses kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak.

5. Manajemen Bencana

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang pengurangan bencana. Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak direncanakan disebabkan oleh factor alam dan juga ulah manusia sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, korban jiwa dan kehilangan harta benda bagi manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang yang rentan terhadap bencana alam khususnya bencana banjir. Banjir sering terjadi di Indonesia khususnya pada saat musim hujan yang

sangat berdampak bagi masyarakat baik dari segi lingkungan, ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Banjir disebabkan oleh 2 faktor yaitu: faktor alam dan faktor ulah manusia. Banjir yang disebabkan faktor alam dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, pasang surut air laut, sedimentasi, kapasitas sungai. Sedangkan banjir yang disebabkan oleh ulah manusia dipengaruhi oleh perubahan-perubahan lingkungan seperti perubahan kondisi aliran sungai, rusaknya drainase lahan, membuang sampah sembarangan, dan merusak hutan.

Resiko banjir tidak bisa dihindari sepenuhnya sehingga harus dikelola. Oleh karena itu untuk perlu adanya manajemen bencana tetapi tidak untuk menghilangkan bahaya banjir hanya untuk menanggulangnya. Resiko banjir tergantung pada komponen yang terdiri dari bahaya dan kerentanan. Keberhasilan manajemen resiko banjir diperoleh jika langkah-langkah struktural, misalnya pembangunan bendungan disungai dilaksanakan dan non-struktural misalnya partisipasi masyarakat juga dilaksanakan. .

Teori manajemen yang digunakan pada penelitian ini berkaitan dengan penanggulangan bencana adalah Teori yang dikemukakan oleh Tun Lie Meo dan Pairote (2006 hal. 396-413). Berdasarkan waktu peristiwa bencana dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu: bagian sebelum, saat dan sesudah bencana. Pada saat yang sama ada 4 kegiatan yaitu mitigasi, kesiapansiagaan (sebelum), respons (saat) dan pemulihan (setelah). Selain itu dalam manajemen bencana banjir sebagai persoalan umum memerlukan pemetaan stuktur interaksi dan keterlibatan. Sebagai pemangku dengan kepentingan sebagai kontak langsung dan akar penyebab terjadinya

bencana banjir tersebut. Dalam konsep govornance (Koiiman 1993) pemangku kepentingan (stakeholders) dapat mencakup pemerintah, non pemerintah, tetapi mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda. Namun pemerintah tetap menjadi peranan utama dalam penanganan banjir karena sebagai pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan utama.

6. Penanganan Bencana Banjir

Penanganan bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi, aspek perencanaan, penanganan sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana meliputi pencegahan, mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan dan tanggapan darurat, pemulihan (BPBN, RI).

a. Penanganan Prabencana merupakan penanganan bencana pada fase sebelum sebelum terjadi bencana terdiri atas situasi tidak terjadi bencana dan situasi terjadi bencana (Nurjanah, 2012). Pada situasi ini perlu adanya kegiatan sebagai berikut:

- a) Perencanaan penanggulangan bencana dilakukan dengan cara penyusunan data tentang resiko bencana berdasarkan dokumen resmi yang berisi program penanggulangan bencana, yang meliputi: pengenalan dan pengajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, penentuan mekanisme kesiapan, dan penanggulangan dampak bencana dan alokasi tugas dan kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- b) Pengurangan resiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang timbul, yang meliputi pengenalan dan

- pemantauan resiko bencana perencanaan partisipatif bencana, pengembangan budaya sadar bencana, dan penerpaan upaya fisik, nonfisik serta peraturan penanganan bencana.
- c) Pencegahan dilakukan untuk mencegah bencana atau resiko yang mungkin terjadi melalui pengendalian pengubah fisik dan lingkungan.
- d) Pemanduan ke dalam perencanaan pembangunan dilakukan melalui pencantuman unsur-unsur rencana pengurangan bencana kedalam rencana pembangunan pusat dan daerah.
- e) Persyaratan analisis resiko bencana dilakukan penelitian untuk mengetahui resiko bencana.
- f) Pelaksanaan penetapan tata ruang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana yang mencakup berlakunya peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penrapan sanksi terhadap pelanggar.
- g) Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk mengurangi jatuhnya korban akibat bencana, maka dalam kurikulum pendidikan dimasukan materi tentang bencana.
- Kegiatan yang dilakukan pada situasi ini antara lain: kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi.
- a. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah tetap dan guna. Kegiatan tersebut harus memiliki aturan sehingga lebih efektif.
- b. Peringatan Dini tujuan dari kegiatan ini adalah menurunkan kualitas dan kuantitas jumlah korban bencana melalui peningktan aksesibilitas informasi.
- c. Mitigasi Bencana adalah serangkain upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana (peraturan pemerintah (PP) No 21 tahun 2008).
- b. Penanganan Bencana Saat terjadi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat bencana yang terjadi guna untuk menyelamatkan korban jiwa, harta dan benda. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) langkah-langkah yang dilkuakn pada kondisi ini adalah:
- 1) Pengakaian cepat dan tepat pada lokasi bencana
 - 2) Penentuan satatus keadaan bencana
 - 3) Penyelamatan dan evakuasi korban
- c. Penanganan pascabencana merupakan awal upaya yang dilkukan pemerintah, yang umumnya dilakukan dengan cara rehabilitasi dan rekontruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek dalam pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekontruksi adalah pembangunan kembali srana dan prasarana di wilayah pasca bencana baik pada pemerintah dan wilayah masyarakat agar semua kebutuhan dari segi ekonomi, budaya dan sosial (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulagn Bencana (PERKA) No.11 Tahun 2008).

Pemulihan dilaksanakan sejak proses penilaian kerusakan dan kerugian perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan yang didukung oleh anggaran-anggaran yang disediakan oleh Pemerintah.

Indonesia telah mengadopsi pengembangan paradigma pengurangan resiko bencana banjir sejak tahun 2005. Secara singkat paradigma baru itu memiliki arti yang penting yaitu:

- a. Penanganan bencana berfokus pada keseluruhan manajemen resiko
- b. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan HAM dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah.
- c. Penanganan bencana bukan hanya lagi urusan pemerintah tetapi juga menjadi penanggung jawab utamanya.

Tujuan adanya penanganan bencana dari pemerintah yaitu memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman bencana sehingga kebijakan-kebijakan dapat tercapai.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif digunakan yakni Kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk evaluasi implementasi dalam penanggulangan banjir di desa Lamanela Kecamatan Ileboleng, Nusa Tenggara Timur. Menurut Nazir dalam Prastewo (2016) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia atau objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kala peristiwa pada masa sekarang. Objek dari penelitian ini adalah

Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Penanganan Banjir, di Desa Lamanela kecamatan Ileboleng Nusa Tenggara Timur.

2. Fokus Penelitian

1. Implementasi Penanganan Banjir yang meliputi:
 - a. Birokasi merupakan suatu lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas yang sudah sesuai dengan ketetapan atau kebijakan, lembaga yang bertugas alam penanganan banjir umumnya dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBD) NTT
 - b. Komunikasikan bagaimana kebijakan itu dapat disampaikan kepada masyarakat atau publik, sehingga dengan adanya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah NTT dan masyarakat kecamatan Ileboleng desa Lamanela dapat menangani banjir yang terjadi.
 - c. Sumberdaya berkaitan dengan siapa saja atau apa saja yang menjadi pendukung dari suatu kebijakan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan pembiayaan/ pendanaan.
 - d. Disposisi Perintah yang tertulis mengenai suatu kebijakan misalnya UU RI NO.24 yang mengatur tentang bencana alam.
2. Evaluasi Penanganan Banjir meliputi:
 - a. Efektifitas suatu hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, misalnya apakah penanganan banjir yang sudah dilakukan sudah dapat menangani atau belum?

- b. Efisiensi dapat tercapai jika sumberdaya diperdayakan secara maksimal sehingga suatu tujuan akan tercapai. Misalnya seberapa banyak program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengani banjir di Lamanela.
 - c. Kecukupan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penangan banjir di Kenjeran dapat dicapai dan dapat dirasakan oleh masyarakat Lamanela sendiri.
 - d. Perataan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir di desa Lamanela sudah tepat sasaran atau belum.
 - e. Keadilan Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penganggulan banjir di Lamanela sudah adil atau belum.
 - f. Resposivitas bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir di Lamanela .
3. Dalam penanggulan bencana banjir pada Daerah Kenjeran agar lebih efektif dan efisien dengan adanya program drainase yang cukup banyak sehingga pembuangan air tidak sembrangan.

4. Objek dan Informan Penelitian

Obyek Penelitian bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka dari itu dilakukan penelitian konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yakni: Evaluasi implementasi Penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah NTT terhadap bencana banjir di Desa Lamanela. Informan-informan yang peneliti libatkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Informan utama 1 adalah Kepala Desa Lamanela
2. Informan utama 2 adalah ketua adat Desa Lamanela
3. Informan tambahan adalah beberapa masyarakat desa Lamanela

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nusa Tenggara Timur dengan fokus utama Desa Lamanela Kecamatan Iteboleng. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di desa tersebut karena lokasi tempat asal peneliti berdekatan dengan desa yang menjadi lokasi peneliti sehingga mempermudah peneliti dalam memperoleh data.

6. Analisis dan Pengumpuln Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dapat diperoleh dari observasi, dokumentasi dan kuesioner/ angket.

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja.

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan. Teknik ini akan menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut.
- c. Dokumen dan Arsip Pada pengumpulan data ini akan dilakukan telah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan ilmiah.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Sejarah Desa Lamanela

Desa Lamanela adalah sebuah desa yang berada di pulau Adonara Kabupaten Flores Timur kecamatan Ileboleng. Desa Lamanela merupakan salah satu desa yang awalnya bergabung dengan desa Hamete kecamatan Ileboleng. Kemudian karena berkembangnya jumlah penduduk kedua desa ini terpisah. Sejak tahun 1948 desa Lamanela sudah mengenal sistem pemerintahan, Desa Lamanela dari tahun 1948 dipimpin oleh bapak Kia Uba, beliau memimpin desa Lamanela sampai tahun 1966. Setelah di pimpin oleh bapak Kia Uba desa Lamanela kembali

bergabung dengan desa lain lagi yaitu desa Pukaone.

Alasan bergabungnya kedua desa ini karena menurut kepercayaan masyarakat kedua desa tersebut memiliki leluhur yang sama kemudian nama desa diganti menjadi desa Neleblolong yang diambil dari gabungan nama suku leluhur yang tinggal didalam desa tersebut dan dipimpin oleh bapak Andreas Ola Ama yang berasal dari desa Pukaone, beliau memimpin hanya 2 tahun, kemudian tahun 1968 diganti oleh bapak Alosius Tupen yang berasal dari desa Pukaone juga, beliau memimpin desa Neleblong paling lama yaitu sampai tahun 1991. Pada masa pemerintahan beliau mulai membentuk stuktur desa untuk membantunya mengolah kedua desa tersebut. Setelah itu desa Neleblolong dipimpin oleh bapak Simon Said Ola dari Lamanela, beliau memimpin sejak 1991-1994. Selama dipimpin beliau masyarakat dari desa Lamanela selalu meminta agar kembali membentuk desa sendiri lagi, dengan alasan agar mempermudah masyarakat Lamanela dalam urusan yang berkaitan dengan desa adanya kesepakatan bersama dari masyarakat dan tokoh adat dari kedua desa tersebut pada tahun 1997, desa Lamanela diberi kewenangan untuk kembali mengurus sendiri dan meminta kepada pemerintahan tingkat kabupaten untuk dimekarkan, dan pada akhirnya pemerintah tingkat kabupaten menyetujuinya. Kemudian pada tanggal 6 Maret tahun 2000 desa Lamanela diresmikan oleh bupati flores timur bapak Drs. L Makeng dan pada saat itu pemilihan kepala desa juga berlangsung. Kepala desa Lamanela yang pertama adalah bapak Siprianus Sanak Kian, beliau memimpin dari tahun 2000-2007. Setelah beliau memimpin kemudian diganti oleh bapak Agustinus Boro Nubi

dari tahun 2007-2012 dan dilantik oleh bupati Flores Timur bapak Drs. Simon Hayon. Dari tahun 2013-2019 desa Lamanela dipimpin oleh Ibu Theresia Totu Pati. Dari tahun 2019- sekarang dipimpin oleh Bapak Pius Pedang. Dari data kependudukan desa Lamanela jumlah keseluruhan penduduk 362 dengan rincian laki- laki 169 jiwa dan wanita 193 jiwa. Pada pemerintahan beliau di tahun 2021 ini desa Lamanela terpapar banjir.

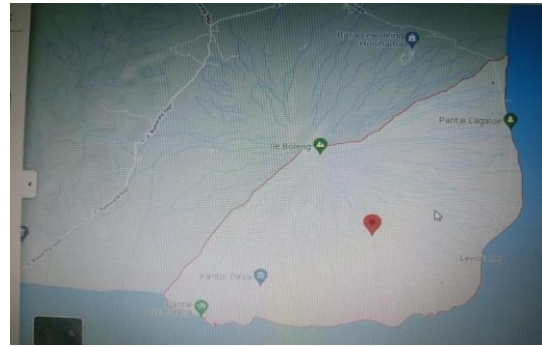
Letak Geografis Desa Lamanela

Desa Lamanela merupakan desa dari bagian Pulau Adonara kabupaten Flores Timur. Kabupaten Flores timur memiliki luas wilayah 5.983,83 km² yang terdiri dari 19 kecamatan dibagi kedalam 229 desa dan 21 kelurahan, Secara Geografis kabupaten Flores Timur terletak pada posisi 0,8004'-0,80 40' LS dan 1220 38'- 1230 57' BT. Wilayah administratif kabupaten Flores Timur berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten/ kota dan bentangan laut yang ada disekitarnya yaitu:

- Sebelah utara : Laut Flores
- Sebelah selatan : Laut Sawu
- Sebelah Barat : Kabupaten Sikka
- Sebelah Timur : Kabupaten Lembata

Salah satu wilayah yang merupakan bagian dari Flores Timur adalah Kecamatan Ileboleng. Kecamatan Ileboleng terdiri dari 18 desa. Salah satu didalamnya adalah desa Lamanela. Secara geografis peta wilayah kecamatan Ileboleng desa Lamanela dapat dilihat pada peta Gambar 2

Gambar: 2. Peta Geografis Kecamatan Ileboleng



Sumber: Googlemap (2021)

Dari peta geografis wilayah kecamatan Ileboleng di atas dapat di jelaskan bahwa desa Lamanela dengan luas wilayah 4,414 km² secara geografis terletak ditengah-tengah antara pantai Wototena dan pantai Lagaloe dan desa tetangga terdekat adalah desa Lewokeling.

Iklim dan Tipografi Desa Lamanela

Pada umumnya iklim di Indonesia mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Bulan Juli-September angin yang bertiup dari Australia yang tidak membawa uap air yang cukup banyak sehingga menyebabkan musim kemarau. Sedangkan pada bulan Desember-Maret angin betiup dari Asia dan Samudra pasifik membawa uap air yang cukup banyak sehingga menyebabkan musim hujan. Keadaan ini terjadi setiap 6 bulan masa peralihan dari bulan April-Mei dan Oktober-November. Maka dari itu semua wilayah Flores Timur sering mengalami musim kekeringan yang berkepanjangan hal ini disebabkan karena hanya 4 bulan (Januari, Februari, Maret dan Desember) yang mengalami musim hujan sedangkan untuk bulan sisanya mengalami musim kemarau.

Tipografi daerah Flores Timur memiliki bentangan alam yang terdiri dari daerah pengunungan dan bukit-bukit yang cukup tinggi.

Tabel 1 . Topografi Kabupaten Flores Timur

No	Topografi	Luas (Km ²)
1.	Ketinggian	
	• 0 m-12 m	• 568,81
	• 100m-500m	• 934,63
2.	Kemiringan	
	• 0%-12%	• 417,20
	• 12-40%	• 799,86
3.	Testur Tanah	
	• Kasar	• 934,63
	• Sedang	• 856,17
	• Halus	• 38,56

Sumber: Data Flotim 2016

Dari data diatas menjelaskan bahwa sebgaaian besar wilayah Flores Timur termasuk didalamnya desa Lamanela memiliki tingkat kemiringan yang cukup tinggi yaitu diatas 12% wilayah perbukitan diatas 100 m dan untuk tekstur tanah mulai dari kasar sampai sedang. Diimbangi dengan musim kemarau yang panjang Flores Timur umumnya rawan terhadap bencana banjir dan longsor.

Visi dan Misi Desa Lamanela

1. Visi

“Bersama membangun desa dalam semangat kakan dike ari sare-opo keru bine baki” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah bersama membangun desa dalam semangat kebersamaan dan mewujudkan kerukunan dan kedamaian masyarakat dalam bingkai kekeluargaan.

2. Misi

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

1. Pengolahan pembangunan yang partisipatif
2. Penataan dan penggutan lembaga kemasyarakatan desa
3. Pengembangan wilayah
4. Pengembangan kesejahteraan sosial

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lamanela

Gambar 3: Struktur Desa Lamanela



Sumber: Di olah Peneliti

Tugas Masing-Masing Pemerintah Desa Lamanela

a. Kepala desa

Kepala desa merupakan seseorang yang dipilih di wilayah desa yang dipilih bertujuan untuk memerintah desa dan melayani kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang memiliki fungsi;

- 1). Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2). Menetapkan peraturan desa
- 3). Mengangkat dan memberhentikan pegawai/ aparat desa
- 4). Mengolah aset desa dan keuangan desa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Sekertaris desa

Sekretaris desa merupakan suatu perangkat yang ada didalam desa yang bertanggungjawab kepada kepala desa. Sekertaris desa berfungsi sebagai:

- 1). Membantu kepala desa mengurus administrasi dan keuangan desa
- 2). Memberi pembinaan untuk perangkat desa lainnya.
- 3). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

c. Pelaksana teknis

Pelaksana teknis didalam desa memiliki fungsi rangkap yaitu fungsi

keamanan dan ketertiban. Pelaksana teknis berfungsi sebagai:

1. Menjaga keamanan masyarakat
2. Penata profil desa
3. Memberipelayanan dalam mengurus KK atau KTP.

Deskripsi penanganan bencana banjir di desa Lamanela

Berdasarkan hasil wawancara peneliti untuk memperoleh data dengan informan atau narasumber yang meliputi kepala desa, tokoh adat dan beberapa tokoh masyarakat desa Lamanela. Penanganan- penanganan yang dilakukan pemerintah dalam menangani banjir di desa Lamanela meliputi tahapan pra bencana, tahapan tanggapan darurat, dan tahapan pemulihan.

Penanganan Pada Tahapan Pra Bencana

Tahapan pra bencana merupakan tahapan penanganan yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana. Untuk memperoleh informasi tentang penanganan pra bencana desa Lamanela peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu kepala desa Lamanela (Bapak Sipri Pedang) dengan mengajukan pertanyaan. "Apa saja dan bagaimana penangananan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelum terjadinya bencana"? Berdasarkan pertanyaan tersebut informan menjawab (Hasil wawancara 2 September 2021):

"Penanganan yang dilakukan selama ini tepatnya selama masa pemerintahan saya hanya melakukan pencegahan secara fisik terhadap lingkungan dengan melaksanakan beberapa program yang telah disepakati bersama masyarakat Lamanela program-program tersebut antara lain: pembangunan selokan- selokan di seputaran desa, perbaikan beberapa tanggul besar dan penanaman pohon jati dan ampupu dibawah kaki gunung Iteboleng yang dilaksanakan pada hari

sabtu atau minggu dan diberi nama Lamanela Cinta Alam, dana yang digunakan merupakan dana desa dari pemerintah pusat sedangkan untuk penanganan lain pada tahapan pra bencana seperti peringat dini sebelum terjadinya bencana belum pernah dilakukan".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penangananan tahapan pra bencana yang dilakukan oleh pemerintah belum efektif, oleh karena itu pemerintah baik dari desa sampai pemerintah pusat harus bekerja sama dalam penanganan pra bencana misalnya adanya penyusunan data tentang resiko terjadinya bencana.

Penanganan pada Tahapan Tanggap Darurat

Penanganan ini dilakukan pada saat bencana terjadi, pada tahap ini hal yang dilakukan adalah penyelamatan korban jiwa. Pada tahap ini juga menentukan status keadaan bencana yang terjadi. Maka untuk memperoleh informasi tentang penanganan tahapan tanggap darurat pada saat terjadi banjir di Desa Lamanela peneliti mewawancarai beberapa informan. Pada informan pertama yaitu bapak kepala desa Lamanela (Bapak Sipri Pedang) peneliti mengajukan pertanyaan "Apa saja usaha atau tindakan yang dilakukan pemerintah desa pada saat penanganan tahapan tanggap darurat banjir di desa Lamanela?". Berdasarkan pertanyaan tersebut informan menjawab (Hasil wawancara 5 September 2021):

"Pada saat terjadinya banjir tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 22.00 WITA tidak ada penangganan yang dilakukan semua masyarakat Lamanela lari mencari pertolongan, dan yang tersisa didesa pada saat itu saya sendiri, tetapi setelah terjadinya banjir dipagi hari baru adanya tindakan dari pemerintahan desa sendiri dan masyarakat Lamanela

dan dibantu oleh masyarakat kampung tetangga tindakan-tindakan tersebut seperti mencari korban, penyelamatan harta benda, pengurusan pengusian sederhana, dan membuat jembatan sederhana karena pada saat terjadinya banjir jembatan penghubung desa Lamanela dengan desa lainnya terputus sehingga bantuan dari pihak pemerintah kecamatan tidak dengan cepat masuk lalu dibuatlah jembatan sederhana dari bambu, dengan adanya jembatan tersebut bantuan dari berbagai pihak baik dari pihak pemerintah maupun swasta mulai keluar-masuk tetapi untuk alat-alat berat yang bertujuan untuk membantu proses pencarian korban mengalami kesulitan pada saat masuk kedalam desa, dan tindakan terakhir dari pemerintah daerah adalah peringatan akan adanya banjir susulan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Flores Timur (BPBD FLOTIM), oleh bapak kepala dinas BPBD FLOTIM (Bapak Alfonsus Hada Bethan) juga disosialisasikan tentang penyebab banjir, yang terjadinya didesa kami”.

Selanjutnya untuk memperoleh informasi tentang tanggapan dari masyarakat Lamanela terhadap penanganan pada saat tanggap darurat yang dilakukan pemerintah, maka peneliti mengajukan pertanyaan “Apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat terjadinya banjir sudah memuaskan masyarakat Lamanela?”. Berdasarkan pertanyaan tersebut informan (bapak Paul Pandang) menjawab (Hasil wawancara 5 September 2021):

“Penanganan yang dilakukan pemerintah pada saat terjadinya bencana sudah memuaskan dimana yang berperan dalam membantu agar korban cepat terevakuasi tidak hanya pemerintah saja

melainkan pihak swasta juga, penanganan seperti tempat pengusian pada hari pertama itu kurang memuaskan tetapi setelah adanya bantuan dari berbagai pihak tempat pengusian lebih diperhatikan”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penanganan yang dilakukan pemerintah dalam menangani bencana pada saat tanggap darurat belum efektif hal ini dibuktikan dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber.

Pada Tahap Pemulihan

Kegiatan ini dilakukan setelah bencana terjadi, pada tahap ini yang biasa dilakukan adalah rehabilitas dan rekontruksi. Rehabilitas adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau pelayanan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan pada wilayah pascabencana. Rekontruksi adalah pembangunan kembali sarana, prasarana dan kelembagaan pada wilayah pascabencana baik dari tingkat pemerintah maupun masyarakat. Tahap pemulihan lebih tertuju pada pembangunan kembali baik dari segi ekonomi, sosial, budaya serta bangkitnya peran masyarakat dari segala aspek kehidupan pada wilayah pasca bencana.

Untuk mendapatkan informasi mengenai penanganan tahap pemulihan bencana banjir di desa Lamanela maka peneliti mewawancarai informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan “Tindakan penanganan apa saja yang dilakukan pada tahap pemulihan, siapa saja yang berperan dalam penanganan pada tahap pemulihan”? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut informan (Ibu Natalia E. Arakian) menjawab (Hasil wawancara 5 September 2021) :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk tahap pemulihan yang pertama pendataan kembali setiap KK yang selamat dari bencana, tujuan dari ini agar mempermudah anggaran dalam pembangunan kembali rumah-rumah warga yang terbawa arus pada saat banjir, tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang bertujuan untuk kepentingan umum bagi masyarakat Lamanela diantaranya pembangunan kembali jembatan dan jalan-jalan lain yang menghubungkan Lamanela dengan desa tetangga, selain itu pembangunan kembali kantor desa sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Puskesmas pembantu (PUSTU) sedangkan untuk yang berperan dalam pemulihan desa Lamanela dari berbagai pihak misalnya instansi KODIM FLORES TIMUR yang membantu pembangunan kembali fasilitas umum dan semua masyarakat Lamanela sendiri dari anak kecil hingga yang dewasa”.

Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan oleh peneliti kepada informan “Apakah tindakan-tindakan yang dilakukan sudah memuaskan masyarakat Lamanela”?

Berdasarkan pertanyaan tersebut informan (Bapak Yohanes Ogo) menjawab (Hasil wawancara 5 September 2021):

“Penanganan setelah terjadinya bencana untuk membangun kembali desa Lamanela sudah memuaskan hal ini dibuktikan adanya berbagai tindakan yang dilakukan, yang melibatkan masyarakat Lamanela sendiri sehingga masyarakat merasa adanya peran pemerintah yang sangat peduli terhadap banjir yang terjadi di desa kami”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan penanganan tahap pemulihan yang dilakukan pemerintah desa Lamanela sudah efektif

hal ini dibuktikan adanya kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat Lamanela dalam penanganannya.

Evaluasi Penanganan Bencana Banjir Di Desa Lamanela

Pendekatan penanganan banjir di desa Lamanela peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh William Dunn (2003) yang meliputi efektif, efisiensi, kecukupan, pemerataan, keadilan dan responsivitas.

a. Efektifitas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Flores Timur sudah efektif karena dalam proses sosialisasi kepada masyarakat desa Lamanela tentang penanganan banjir dan Tetapi dari komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dinilai oleh masyarakat Iteboleng kurang efektif karena tidak melibatkan semua masyarakat, sehingga masyarakat menilai adanya rapat tertutup.

b. Efisiensi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti untuk kebijakan implementasi dimana usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pasca bencana di desa Lamanela sudah dipandang memuaskan masyarakat Lamanela. Hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan berupa anggaran-anggaran untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang ada di desa Lamanela dan bantuan-bantuan lain seperti obat, baju-baju, makanan dan minuman.

c. Kecukupan

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dengan cara mewawancarai beberapa tokoh masyarakat dalam penanganan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu dari pusat maupun dari pemerintah desa Lamanela sudah dipandang bahwa penanganan yang dilakukan pemerintah sudah dapat

mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepuasan masyarakat dalam hal bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah.

d. Pemerataan

Hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dengan cara mewawancarai kepala desa Lamanela bapak Pius pedang tentang bagaimana pemerataan dana dan bantuan berupa sarana dan prasarana yang berikan oleh pemerintah pusat, dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sudah di gunakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan misalnya pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang digunakan untuk keperluan masyarakat.

e. Ketepatan

Hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dengan cara mewawancarai beberapa tokoh masyarakat Lamanela tentang penanganan banjir. Ketepatan dalam hal ini lebih menekankan penanganan pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat Lamanela sudah tepat. Hal ini dibuktikan dengan adilnya pembagian ganti rugi pembangunan rumah-rumah masyarakat oleh pemerintah pusat melalui pemerintah desa.

f. Resposivitas

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan mewawancarai kepala desa beberapa tokoh masyarakat desa Lamanela. penanganan banjir yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan cara bersosialisasi dapat diterima oleh masyarakat desa Lamanela.

Implementasi penanganan Banjir Desa Lamanela

Pendekatan kebijakan implementasi penanganan banjir di Desa Lamanela peneliti menggunakan teori Geogre Edward III yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan birokrasi.

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan banjir di desa Lamanela agar dapat tercapai. Langkah awal yang dilakukan dalam penanganan banjir pasca bencana di desa Lamanela bersosialisasi secara umum kepada masyarakat Lamanela yang secara langsung disampaikan oleh kepala dinas BPBD FLOTIM bapak Alfonsus Hada Bethan yang dibantu oleh beberapa petugasnya tentang penyebab banjir secara kondisi alam, curah hujan dan kelalaian dari manusia, yang dimana letak desa Lamanela yang berada dibawah kaki gunung dan berada diantara dua pantai, dan cara penanggulangannya agar bencana di desa Lamanela dapat dicegah disosialisasikan tentang tidak menebang pohon sembarangan sehingga tidak menyebabkan gundulnya hutan didaerah pengunungan sehingga pada saat musim hujan tidak ada pohon yang menyerap. Langkah berikutnya dari program desa Lamanela sendiri adalah bersosialisasi secara internal, dimana sosialisasi tersebut hanya melibatkan tokoh-tokoh adat desa Lamanela dan beberapa masyarakat penting didalam desa Lamanela, masyarakat desa Lamanela tidak semua diikutsertakan karena situasi mengingat adanya wabah covid-

19. Sosialisasi ini bertujuan untuk menggali informasi dari tokoh-tokoh adat penyebab banjir di desa Lamanela, karena menurut kepercayaan dari tokoh-tokoh adat desa Lamanela banjir terjadi akibat adanya perbuatan masyarakat Lamanela yang tidak disukai oleh penjaga gunung Ileboleng yaitu dengan mengambil air belerang dari mata air gunung Ileboleng dan membawa ke rumah lalu menjual diberbagai kota bahkan ke luar negeri kerena menurut kepercayaan air tersebut dapat membawa

keberuntungan, sementara itu secara kepercayaan adat air belerang dari gunung Iteboleng tidak boleh membawa kerumah karena sama saja membawa bencana. Maka berdasarkan adanya komunikasi tersebut bentuk penanganan yang dilakukan adalah dilakukan pemulihan budaya.

b. Sumberdaya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sumberdaya yang dilakukan ataupun yang diberikan kepada masyarakat dalam hal ini pemerintah desa Lamanela tidak berdiri sendiri melainkan semua struktur pemerintah baik dari pusat, provinsi, daerah dan desa semua berperan. Sumberdaya yang diberikan pemerintah baik dari pusat maupun daerah meliputi sumberdaya, anggaran dan sarana dan prasarana.

Sumberdaya manusia dalam hal ini masyarakat desa Lamanela bersama bantuan sumberdaya manusia dari pemerintah antara lain petugas BPBD FLOTIM dibawah pimpinan bapak Alfonsius, TNI dan Polri yang bertujuan membantu proses pencarian korban pada saat pasca bencana. Anggaran diberikan kepada semua masyarakat yang menjadi korban banjir di desa Lamanela, anggaran ini berupa dana yang diberikan dari pemerintah pusat bertujuan untuk pembangunan rumah, dan untuk anggaran lain diberikan kepada pemerintah desa bertujuan untuk membangun kembali fasilitas-fasilitas desa yang berfungsi untuk pelayanan masyarakat desa Lamanela misalnya pembangunan untuk kesehatan, pendidikan, jalan/ jembatan penghubung dengan desa tetangga dan pelayanan umum lainnya. Sarana dan prasarana dalam penanganan banjir pemerintah sudah menyiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat pasca bencana penanganan yang dilakukan adalah menyiapkan pengisian

yang aman kepada masyarakat Lamanela, bantuan obat-obat makanan dan minuman, baju-baju dan bantuan-bantuan lain seperti alat-alat berat yang digunakan untuk mempermudah proses pencarian korban, tetapi untuk alat-alat berat kurang memadai dikarenakan alat berat yang digunakan tidak dapat masuk semua kedalam desa Lamanela kerana jembatan menuju desa Lamanela terputus.

a. Disposisi

Berdasarkan yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti, untuk desa Lamanela belum adanya stuktur organisasi desa yang ditugaskan secara khusus dalam penanganan banjir. Tetapi dengan adanya lembaga bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana dan bantuan lembaga pemerintah lainnya. Secara disposisi penanganan pasca bencana yang terjadi di desa Lamanela sangat baik karena penanganan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan apa yang diharapkan dimana dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dimana semua pihak yang membantu tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, dan tidak hanya memiliki kemampuan untuk penanganan pasca banjir di Desa Lamanela tetapi juga pemerintah tidak mementingkan kepentingan pribadi melainkan kepentingan bersama atau adanya dorongan untuk membantu sesama.

b. Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam penanganan banjir di desa Lamanela yang dilakukan oleh lembaga pelaksanaan yang membantu penanganan banjir dari pemerintah secara keseluruhan sudah optimal, meskipun bantuan sumberdaya manusia dan sarana prasarana pada saat itu cukup lamban dikarena pada saat pasca bencana daerah desa Lamanela dan desa tetangga lainnya

di landa hujan yang cukup deras, dan jalan raya/ jembatan semuanya terputis sehingga pada saat itu pemerintah juga kewalahan dalam penganannya.

Analisis Evaluasi dan Implementasi Penanganan Banjir Desa Lamanela

Suatu kebijakan yang telah dibentuk akan bermanfaat untuk lingkungan

sekitarnya, yang artinya hubungan antara kebijakan dan kebijakan publik memiliki hubungan yang saling berpengaruh (Agustino, 2014:45). Berdasarkan hasil wawancara peneliti maka analisis evaluasi dan implementasi penanganan banjir desa Lamanela dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Analisis Evaluasi Dan Implementasi Penanganan Banjir Desa Lamanela

Implementasi Evaluasi	Komunikasi	Sumberdaya	Disposisi	Birokrasi
Efektivitas	Komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir desa Lamanela sudah anggaran dianggap sudah efektif, meskipun penyampaian informasi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Lamanela	Sumberdaya yang diberikan pemerintah dalam penanganan banjir desa Lamanela yang meliputi anggaran, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia yang turut dilibatkan dalam penanganan banjir desa Lamanela, efektivitas sumberdaya yang diberikan pemerintah dinilai sudah efektif meskipun untuk sarana penanganan misalnya alat-alat berat belum memadai.	Disposisi yang melibatkan implementor-implementor dari Pemerintah yang sudah sangat efektif hal ini dibuktikan dengan adanya tanggungjawab penuh serta keterlibatan masyarakat dalam penanganan banjir desa Lamanela contohnya pengevakuasian korban, penyiapan tempat pengungsian.	Birokrasi yang dilakukan dalam penanganan banjir desa Lamanela sudah efektif, krena dalam penanganan telah melibatkan seluruh pihak baik dari pemerintah maupun swasta sehingga masyarakat Lamanela merasa sangat puas.
Efisiensi	Usaha yang dilakukan pemerintah dalam penyampaian informasi tentang penyebab banjir, dengan cara mensosialisasikan tentang penyebab banjir meskipun belum sepenuhnya dipahami dan belum dipercaya karena adanya kepercayaan penyebab banjir akibat ulah masyarakat yang mencuri air dari gunung.	Sumberdaya efisiensi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir dengan adanya berbagai usaha atau upaya dalam penanganannya contoh penanganan evakuasi korban yang dan pemberian anggaran-anggaran untuk pembangunan kembali desa Lamanela	Efisiensi disposisi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir desa Lamanelasudah memuaskan hal ini dibuktikan dengan upaya-upaya yang dilakukan sangat tulus sehingga kepedulian dirasakan oleh masyarakat Lamanela	Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah memuaskan karena adanya tanggungjawab yang penuh dari implementor-impemtor dari pemerintah.
Kecukupan	Kecukupan komunikasi dari pemerintah sebelum terjadinya bencana belum cukup karena penyampaian tentang sosialisasi sebelum bencana belum pernah dilakukan.	Kecukupan sumberdaya dinilai sangat memuaskan karena dengan adanya sumberdaya yang diberikan pemerintah penanganan banjir desa Lamanela dapat tercapai.	Kecukupan disposisi yang dikaukan pemerintah untuk penanganan desa Lamanela sudah memuaskan karena kerlibatan pemerintah.	Kecukupan birokrasi dalam penanganan banjir desa Lamanela sudah dianggap cukup karena adanya keterlibatan dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa
Ketepatan	Komunikasi yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya tepat karena penyampaian/ sosialisasi tentang penanganan banjir.	Ketepatan sumberdaya yang diberikan pemerintah suda tepat karena adanya kepuasan masyarakat Lamanela	Ketepatan disposisi dengan cara pemerintah mengangkat personil-personil dalam penanganan adanya kehadiran personil tersebut dalam penanganan.	Keterlibatan pemerintah dari pusat sampai desa sangat memuaskan masyarakat Lamanela.
Pemerataan	Untuk komunikasi pemerataan setelah bencana dinilai sangat memuaskan karena pemerintah mensosialisasikan serta memberi peringatan dini bila terjadinya bencana susualan,	Pemberian atau pendistribusian sumberdaya yang diberikan oleh pemerintah sudah rata, salah satunya pembagian makanan dan minuman serta bantuan anggaran lainnya.	Dengan adanya pemerataan pengangkat personil sehingga adanya bantuan penanganan banjir desa Lamanela dilakukan secara cepat.	Pemerataan tugas yang diberikan kepada lembaga-lembaga yang membantu sehingga adanya tanggung jawab yang berbeda setiap lembaga sehingga proses penanganan dilaksanakan secara cepat dan dirasakan oleh masyarakat Lamanela
Responsivitas	Komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan cara sosialisasi belum sepenuhnya	Respon yang diberikan pemerintah dalam penanganan banjir desa Lamanela sudah dianggap baik karena bantuan-bantuan yang datang sangat cepat.	Bantuan yang dilakukan dari setiap individu atau Personal dari pemerintah sangat bertanggungjawab.	Penanganan yang dilakukan pemerintah sudah memuaskan karena penanganan yang dilakukan secara cepat.

Faktor pendorong dan Penghambat Penanganan Banjir Desa Lamanela

1. Faktor-faktor pendorong

Faktor-faktor pendorong dalam menangani banjir di Desa Lamanela adalah sebagai berikut:

a. Faktor sosial, budaya dan ekonomi, tingkat masyarakat dalam perkembangan ekonomi dan sosial mempengaruhi penanganan banjir. Faktor pendorong sosial, budaya dan ekonomi dalam penanganan banjir desa Lamanela adalah sebagai berikut:

1. Peran masyarakat Lamanela yang sangat tinggi dalam penanganan banjir misalnya penanganan sebelum terjadinya banjir dengan membuat program Lamanela Cinta Alam, dan pembautan selokan dan tanggul tanggul, penanganan saat terjadinya banjir dimana masyarakat yang masih kuat dan tertolong membantu pihak pemerintah dalam proses pencarian korban.
2. Peran pemerintah baik dari pusat sampai pada pemerintah desa dimana pemerintah menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat Lamanela. Sehingga adanya kepuasan dari masyarakat bagaimana peran pemerintah.

b. Faktor politik

Kondisi politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima tau dapat bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat, faktor politik yang dapat mendorong penanganan banjir desa Lamanela adalah sebagai berikut: Kejadian banjir desa Lamanela ditetapkan sebagai banjir yang parah, maka penanganan banjir desa Lamanela direspon dan ditangani langsung oleh kota kecamatan Iteboleng, sehingga penanganan bencana khususnya pada evakuasi korban dapat bantuan yang datang dari berbagai kalangan dan bahkan dari seluruh Indonesia.

2. Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat dalam penanganan banjir di desa Lamanela adalah sebagai berikut:

a. Faktor sosial, budaya dan ekonomi faktor penghambat dari faktor sosial, budaya dan ekonomi dalam penanganan banjir di desa Lamanela adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dinilai kurang dalam mensosialisasikan tentang penanganan sebelum bencana, sehingga pada saat terjadinya bencana masyarakat tidak dapat mengurangi dampak bencana.
2. Terlalu mempercayai budaya/ adat sehingga dalam penyampaian informasi masih ada masyarakat yang kurang mempercayai penyebab banjir.
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

b. Faktor politik, faktor penghambat banjir desa Lamanela adalah sebagai berikut:

1. Belum memiliki Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), Standart Operasi Prosedur (SOP) dan peraturan yang secara khusus mengatur tentang penanggulangan bencana di daerah sehingga menyebabkan ketrgantung dalam penanganan karena harus menunggu penanganan dari kota FLOTIM sendiri.
2. Susah untuk menentukan status bencana yang terjadi karena belum adanya BPBD sendiri di kecamatan.
3. Penangan yang dilakukan sebelum oleh desa Lamanela sendiri, masih belum dipahami oleh masyarakat sendiri karena belum adanya pihak dari kecamatan untuk mesosialisasikan terlebih dahulu.

Penanganan yang telah di lakukan oleh pemerintah desa Lamanela

Penanganan bencana merupakan tanggungjawab bersama seperti yang dijelaskan dalam peraturan daerah Kecamatan Iteboleng No 7 Tahun 2017, tentang penyelenggaraan penanganan bencana, baik pemerintah, swasta maupun seluruh elemen lapisan masyarakat ikut bertanggungjawab dalam

penanganan bencana untuk keselamatan diri, keluarga, serta lingkungan tempat hidupnya. Dalam Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap daerah harus melakukan persiapan sebelum, sesaat, dan sesudah bencana. Penaganan banjir yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Lamanela dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Penanganan Banjir Desa Lamanela

Aspek Penanganan Banjir Lamanela	Bentuk Penanganan
Sebelum (Program pemerintah desa Lamanela)	Upaya-upaya yang sudah dilakukan dari pemerintah desa Lamanela dalam pencegahan banjir: <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan selokan- selokan diseputaran desa • Perbaikan beberapa tanggul besar . • Adanya program desa yaitu “Lamanela Cinta Alam” untuk menanam beberapa jenis pohon seperti pohon ampupu dan jati disekitar kaki gunung Iteboleng setiap 1 bulan sekali antara hari sabtu atau minggu.
Saat	Upaya yang dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> • Penyelamatan dan evakuasi korban yang dilakukan oleh masyarakat Lamanela dan masyarakat desa tetangga • Penyelamatan harta benda yang masih tersisa • Pengurusan pengusian • Memberitahu kepada pemerintah kecamatan tentang telah terjadinya bencana • Pembuatan jembatan sementara dengan menggunakan bambu sehingga bantuan- bantuan dari luar dapat masuk • Peringat Informasi adanya banjir susulan dari BPBD FLOTIM • Ketersedian sarana dan prasarana dari berbagai sumber bantuan baik dari pemerintah maupun swasta
Sesudah	Upaya yang dilakauakn setelah bencana terjadi: <ul style="list-style-type: none"> • Langkah awal yang dilakukan adalah pemulihan terhadap budaya dan adat desa Lamanela • Pemulihan rehabilitasi perbaikan pelayanan umum masyarakat Lamanela dari kantor desa, sekolah dasar, dan puskesmas. • Pemulihan Rekontruksi pembangunan kembali saran dan prasarana misalnya membangun kembali

	<p>jembatan dan jalan raya penghubung desa Lamanela dan desa tetangga. Pembangunan kembali rumah-rumah warga desa Lamanela yang sudah hancur terbawa arus banjir.</p> <ul style="list-style-type: none">• Penataan kembali tentang perekonomian, sosial dan budaya agar kehidupan dapat berjalan normal
--	---

Sumber: Dolah Peneliti

Dengan adanya upaya atau penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Lamanela maka perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi penanganan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa Lamanela.

Rekomendasi Penanganan Banjir di Desa Lamanela

Penanganan bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, saat, sesudah, terjadi bencana meliputi pencegahan, mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan (Depkes, 2005).

Tujuan dari adanya penanganan bencana berdasarkan Undang- Undang No. 24 tahun 2000 Pasal 4 memberikan perlindungan kepada masyarakat dan ancaman bencana menyelaraskan peraturan perundang- undang yang sudah ada menjamin terselenggaranya penanganan bencana secara terencana, terpadu, terkordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi, dan kemitraan publik, serta swasta, mendorong semangat, gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, dan menciptakan perdamaian, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang bersumber dari kepala desa, tokoh adat dan beberapa masyarakat Lamanela ditemukan fenomena masalah dalam penanganan sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan mengenai pencegahan saat terjadinya bencana dan mitigasi masih kurang contohnya sosialisasi yang masih kurang optimal.
2. Kepercayaan masyarakat tentang bencana yang terjadi menurut adat atau budaya masih terlalu tinggi sehingga kesadaran dari masyarakat kurang.
3. Sumberdaya Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam proses pencarian korban pada saat terjadinya bencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang dapat digunakan dalam penanganannya adalah komunikasi pemerintah daerah dan pemerintah desa harus lebih optimal. Sosialisasi yang sebaiknya dilakukan meliputi pencegah, dan penanganan sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana. Penanganan yang dilakukan sebelum bencana adalah adanya suatu informasi dari pemerintah tentang cuaca yang terjadi, saat terjadinya bencana upaya yang dilakukan adalah pemerintah harus cepat dan tepat dalam penanganannya dan upaya yang dilakukan.

Evaluasi Implementasi Penanganan Banjir Desa Lamanela

Evaluasi implementasi merupakan evaluasi terhadap proses implementasi kebijakan terhadap hasil atau pencapaian tujuan kebijakan dan cara atau solusi untuk mengatasi perbedaan antara harapan dan kenyataan. Berdasarkan hasil temuan peneliti evaluasi implementasi dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat proses

implementasi yang dilakukan dengan menggunakan teori Geogre C. Edwar dan untuk mengevaluasi hasil pencapaian dengan menggunakan kriteria menurut William N Dunn. Evaluasi implementasi menurut kedua teori tersebut meliputi:

a. Efektivitas

Efektivitas adalah ketercapaian tujuan setelah kebijakan dilaksanakan. Lebih ditekankan kepada apakah hasil yang diinginkan dapat tercapai. Hubungan antara evaluasi efektivitas dan implementasi dalam penanganan banjir di desa Lamanela dipaparkan sebagai berikut:

b. Komunikasi

Hal ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi akan efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan. Maka untuk mengetahui komunikasi para pelaksanaan dalam penanggulangan banjir di desa Lamanela peneliti mewawancarai beberapa narasumber terkait dengan bagaimana komunikasi pemerintah dengan masyarakat Lamanela dalam penanganan banjir, “apakah bentuk komunikasi tersebut sudah efektif atau belum”. Maka berdasarkan itu jawaban yang diberikan oleh informan (bapak Vinsen Bot)

“Komunikasi yang dilakukan sudah dianggap efektif dimana pemerintah daerah dinas BPBD FLOTIM turun tangan dengan cara bersosialisasi secara terbuka tentang penyebab banjir dan pencegahan” (hasil wawancara 4 September 2021).

Komunikasi dalam implemementasi kebijakan berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memahami isi kebijakan, masyarakat menjadi sasaran kebijakan harus mengetahui kebijakan sehingga masyarakat dapat pengawasi

kesesuaian pelaksana kebijakan dengan peraturan kebijakan yang sudah ada (Harjianti, 2009).

a. Sumberdaya

Sumberdaya yang dimaksud dalam implementasi penanganan banjir adalah semua kebijakan harus didukung oleh sumber daya manusia, anggaran dan sarana dan prasarana. Maka untuk mengetahui bagaimana sumberdaya yang dilakukan pemerintah ”apakah komunikasi untuk sumberdaya sudah efektif atau belum”. Maka berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan menjawab (Bapak Nikolaus Demon)

“Komunikasi mengenai sumberdaya manusia, anggaran dan saran dan prasarana kurang dipandang kurang efektif hal ini dibuktikan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam penganan banjir misalnya ketersediaan alat-alat berat dalam penaganan pencarian korban banjir” (Hasil wawancara 4 September 2021).

Sumberdaya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, sumberdaya akan tercapai jika sumberdaya manusia dan sumberdaya modal merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam implementasi (Yuliana, 2015).

b. Disposisi

Sikap atau perilaku pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarah pada ketaatan implemementor dalam menjalankan tugas agar tujuan dapat tercapai. Komitmen mengarah pada sifat antusias yang dimiliki oleh implemementor dalam melaksanakan tugasnya. Maka untuk mengetahui “bagaimana sikap implemementor dalam penanganan banjir kepada masyarakat Lamanela sudah efektif atau belum”,

Berdasarkan hasil wawancara peneliti informan menjawab (Ibu Maria Goe)

“Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan sudah sangat memuaskan warga dimana semua implementor dari pemerintah sudah sangat efektif, hal ini dibuktikan dengan implementor sangat bertanggungjawab dalam menanggapi evakuasi korban dan kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat Lamanela sehingga penanganan banjir dapat tercapai” (Hasil wawancara 4 September 2021).

Sikap akan meningkatkan kesan baik, implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran, sehingga adanya kepercayaan tinggi dari masyarakat (Indiahono, 2009:32).

c. Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu hal yang penting dalam implementasi. Dalam birokrasi terdapat dua hal penting yaitu dan struktur organisasi pelaksana. Maka untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat Lamanela sudah efektif atau belum. Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan menjawab (Bapak Tarsi Odos)

“penanganan yang dilakukan terhadap masyarakat sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan penanganan dilakukan oleh pemerintah tidak melibatkan satu pihak saja, melainkan disebar luaskan kepada semua pihak pemerintah atau swasta (Hasil wawancara 4 September 2021).

Salah satu indikator dalam birokrasi pelaksana kebijakan adalah standar operasional prosedur (SOP). SOP dianggap penting karena merupakan panduan dalam melakukan suatu kegiatan dari kebijakan (Hikmah, 2014).

b. Efesensi

Efesensi dapat diartikan ketercapaian tujuan kebijakan setelah kebijakan yang

telah dilakukan atau lebih ditekankan pada seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan antara evaluasi efesensi dan implementasi dalam penanganan banjir di desa Lamanela dipaparkan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan banjir didesa Lamanela, untuk memperoleh informasi tentang apakah komunikasi yang dilakukan pemerintah sudah efesensi dan sudah memuaskan masyarakat Lamanela atau belum. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan menjawab (Bapak Tarsi Odos)

“usaha pemerintah dalam menangani banjir Lamanela sudah efisien karena dalam penyampaian sosialisasi sebagian masyarakat Lamanela mudah memahami” (Hasil wawancara 4 September 2021).

Efisiensi komunikasi merupakan hal penting dalam evaluasi implementasi penanganan banjir dengan adanya komunikasi yang efesensi maka tujuan penanganan banjir dapat tercapai.

b. Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya lebih menekan pada sumberdaya anggaran dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir. Maka untuk mengetahui apakah efesensi sumberdaya terutama sumberdaya anggaran yang diberikan oleh pemerintah sudah efesensi atau belum. Berdasarkan wawancara peneliti informan memberikan data jumlah anggaran dan fungsi anggaran yang diberikan oleh pemerintah FLOTIM kepada desa Lamanela dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Penggunaan Anggaran Bencana Banjir Desa Lamanela

Jumlah Anggaran	Keterangan Penggunaan Anggaran
Rp. 1.057.493.272	Dana bantuan pemulihan desa
Rp. 337.874.198	Pengunaan umum
Rp. 452.035.648	Pembangunan fasilitas umum
Rp. 38.575.000	Pembinaan kemasyarakatan
Rp. 329.656.800	Pembangunan rumah korban banjir

Sumber: Data Anggaran Banjir Desa Lamanela 2021

Berdasarkan tabel diatas efesensi sumberdaya anggaran di desa Lamanela sudah efesensi karena anggaran yang diberikan digunakan untuk kepentingan umum masyarakat Lamanela. Menurut Soulisa (2005) efesensi sumberdaya anggaran jika tidak tersedia secara optimal maka implementasi kebijakan secara bisa jadi tidak tercapai.

b. Disposisi

Untuk mendapatkan informasi tentang efesensi atau tidaknya disposisi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan banjir didesa Lamanela. Jawaban yang diberikan oleh informan (Ibu Maria Goe)

“sikap atau perilaku dari semua bagian dari pemerintah sudah sangat efesensi, hal ini dibuktikan dengan penanganan dan jenis upaya dalam mengevakuasi korban yang dilakukan semuanya dengan tulus” (Hasil wawancara 4 September 2021).

Menurut Rizqie (2014) sikap pelaksana dalam implementasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.

c. Birokrasi

Efesensi atau tidaknya penanganan yang dilakukan pemerintah desa Lamanela untuk meperoleh infomasi ini peneliti mewancarai informan dengan mengajukan pertanyaan apakah birokrasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat sudah efesensi, dengan adanya pertanyaan itu jawaban yang

diberikan oleh informan (Bapak Paul Pandang)

“usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam penganana banjir desa Lamanela sudah sesuai dengan aturan pemerintah dan untuk SOP (Standar Operasi procedure) dari impelementor juga sudah efesensi hal ini dibuktikan dengan adanya tanggung jawab penuh dari dinas BPBD FLOTIM dan berketja sama dengan beberapa dinas lainnya seperti dinas kesehatan, PMI, dan beberapa dinas daerah lainnya (Hasil wawancara, 4 September 2021).

Dari hasil jawaban wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam suatu penanganan banjir SOP menjadi pedomaan untuk semua implementor, sehingga dapat bertidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

c. Kecukupan

Kecukupan merupakan sesuatu yang lebih menekan pada tingkat efektivitas pelaksana dalam memuaskan kebutuhan. Kriteria kecukupan berfokus pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Hubungan antara evaluasi kecukupan dan implementasi dalam penanganan banjir di desa Lamanela dipaparkan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Untuk memperoleh hasil komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat Lamanela, dalam memperoleh data maka yang dilakukan peneliti adah dengan mewawancarai informan dengan mengajukan pertanyaan apakah komunikasi yang dilakukan pihak pemerintah dalam menagani banjir desa Lamanela sudah memuaskan atau belum. Maka dengan adanya pertanyaan tersebut informan menjawab (Bapak Tarsi Odos)

“Komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir masih belum memuaskan bagi

masyarakat Lamanela, hal ini dibuktikan dalam penanganan sebelum terjadinya bencana dari pemerintah kecamatan tidak pernah mensosialisasikan bencana, tetapi untuk pemerintah desa sendiri dalam penanganan banjir sudah dilaksanakan beberapa program” (hasil wawancara 4 September 2021).

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan dari pencapaian tujuan dari implementasi, bencana alam memang tak bisa dihindari dan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja tetapi dapat dicegah bertujuan untuk mengurangi dampak/resiko (Agustino, 2016).

b. Sumberdaya

Kecukupan sumberdaya yang dimaksud adalah kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak bencana yang meliputi kecukupan sumberdaya manusia, anggaran dan sarana dan prasarana. Untuk memperoleh data kecukupan sumberdaya dalam penanganan banjir desa Lamanela, peneliti mewawancarai informan dengan mengajukan pertanyaan apakah sumberdaya yang berikan pemerintah kepada masyarakat Lamanela sudah cukup atau belum. Maka berdasarkan pertanyaan tersebut informan menjawab (Bapak Paul Pandang)

“Untuk kecukupan sumberdaya manusia dalam mengani banjir desa Lamanela dinilai sangat cukup, hal ini dibuktikan bantuan dalam penanganan untuk evakuasi korban dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah dan swasta, dan untuk sumberdaya anggaran yang diberikan pemerintah juga dinilai sangat cukup, hal ini dibuktikan anggaran-anggaran yang berikan pemerintah saat terjadinya bencana dan setelah bencana diberikan untuk bantuan- bantuan seperti pembangunan kembali rumah- rumah masyarakat yang terkena dampak banjir, sedangkan untuk

sarana dan prasarana kurang cukup dalam penanganan karena alat-alat berat dalam proses penanganan ada setelah evakuasi korban banyak ditemukan oleh bantuan fisik sumberdaya manusia” (Hasil wawancara 4 September, 2021).

Kecukupan hasil implementasi merupakan suatu kebijakan evaluasi untuk mengurangi masalah yang terjadi di masyarakat (Seulisa, 2007).

c. Disposisi

Kecukupan disposisi merupakan seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah, kebijakan yang dilakukan agar tercapainya kecukupan disposisi dipengaruhi oleh sikap para implementor, yang dimana pribadi setiap implementor harus jujur, komitmen dan demokratis. Kriteria sikap tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan dalam menangani masalah yang dialami oleh masyarakat. Maka untuk memperoleh data kecukupan disposisi yang dilakukan terhadap masyarakat Lamanela, peneliti mewawancarai informan dengan mengajukan pertanyaan apakah kecukupan disposisi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir desa Lamanela sudah memuaskan masyarakat. Berdasarkan pertanyaan tersebut informan menjawab (Bapak Paul Pandang)

“untuk kepuasan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir tanggungjawab setiap pribadi yang sangat tinggi dan mempunyai komitmen yang sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan dalam penanganan evakuasi korban dimana kepala desa sendiri turun tangan”

“Untuk kecukupan sumberdaya manusia dalam mengani banjir desa Lamanela dinilai sangat cukup, hal ini dibuktikan bantuan dalam penanganan

untuk evakuasi korban dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah dan swasta, dan untuk sumberdaya anggaran yang diberikan pemerintah juga dinilai sangat cukup, hal ini dibuktikan anggaran-anggaran yang berikan pemerintah saat terjadinya bencana dan setelah bencana diberikan untuk bantuan- bantuan seperti pembangunan kembali rumah- rumah masyarakat yang terkena dampak banjir, sedangkan untuk sarana dan prasarana kurang cukup dalam penanganan karena alat-alat berat dalam proses penanganan ada setelah evakuasi korban banyak ditemukan oleh bantuan fisik sumberdaya manusia” (Hasil wawancara 4 September, 2021).

Kecukupan hasil implementasi merupakan suatu kebijakan evaluasi untuk mengurangi masalah yang terjadi di masyarakat (Seulisa, 2007).

d. Disposisi

Kecukupan disposisi merupakan seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah, kebijakan yang dilakukan agar tercapainya kecukupan disposisi dipengaruhi oleh sikap para implementor, yang dimana pribadi setiap implementor harus jujur, komitmen dan demokratis. Kriteria sikap tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan dalam menangani masalah yang dialami oleh masyarakat. Maka untuk memperoleh data kecukupan disposisi yang dilakukan terhadap masyarakat Lamanela, peneliti mewawacarai informan dengan mengajukan pertanyaan apakah kecukupan disposisi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir desa Lamanela sudah memuaskan masyarakat. Berdasarkan pertanyaan tersebut informan menjawab (Bapak Paul Pandang)

“untuk kepuasan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir tanggungjawab setiap pribadi yang sangat tinggi dan mempunyai komitmen yang sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan dalam penanganan evakuasi korbannya kepala desa sendiri turun tangan”

“untuk pemerataan komunikasi baik dari pemerintah kecamatan maupun desa dalam penanganan sebelum banjir tidak pernah, tetapi dalam pemerataan komunikasi setelah banjir komunikasi didistribusikan kepada masyarakat Lamanela melalui sosialisasi dan diberikan peringatan dini jika ada bencana susulan “ (Hasil wawancara, 5 September 2021).

Pemerataan komunikasi dikatakan berhasil jika ada hubungan interaksi antara pelaksana dan sasaran kebijakan sehingga dapat mencapainya tujuan (Nusation, 2016).

a. Sumberdaya

Pemerataan sumberdaya lebih menekan pada bantuan-bantuan yang diberikan dalam menangani banjir, maka untuk memperoleh informasi, peneliti melakukan wawancara kepada informan dengan mengajukan pertanyaan apakah bantuan-bantuan yang telah disediakan pemerintah sudah didistribusikan secara merata, berdasarkan pertanyaan tersebut jawaban dari peneliti

“sumberdaya bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak swasta maupun pemerintah sudah didistribusikan dan pembagiannya merata, misalnya pembangunan rumah kembali untuk KK yang terpapar”(hasil wawancara, 5 September 2021).

Sumberdaya pemerataan akan dianggap cukup manfaatnya jika telah didistribusikan (Hikmah, 2014).

a. Disposisi

Pemerataan disposisi lebih menekan pada pendistribusian pelaksanaan kebijakan kepada sasaran kebijakan, untuk memperoleh informasi maka peneliti mewawancarai informan dengan mengajukan pertanyaan apakah pengangkat personil dapat mempengaruhi pemerataan disposisi, berdasarkan pertanyaan tersebut jawaban informan (Bapak Pius Pedang)

“Pengangkat personil mempengaruhi pemerataan karena dengan adanya bantuan personil yang turun untuk membantu menangani banjir di desa Lamanela, maka akan membantu masyarakat” (hasil wawancara 5 September 2021).

b. Birokrasi

Pemerataan birokrasi lebih menekan pada pendistribusian tanggung jawab dari implementor kepada masyarakat, untuk memperoleh informasi maka peneliti mewawancarai informan dengan mengajukan pertanyaan apakah dengan adanya lembaga bantuan dari pemerintah kecamatan dapat mempengaruhi distribusi birokrasi dalam penanganan banjir yang terjadi, berdasarkan jawaban tersebut informan menjawab

“dengan adanya lembaga bantuan dari pemerintah kecamatan sangat membantu penanganan banjir karena fokus setiap lembaga memiliki tanggungjawab yang berbeda sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. (hasil wawancara, 5 September 2021).

c. Ketepatan

Ketepatan merupakan nilai dari tujuan kebijakan yang melandasi tujuan kebijakan yang telah dilakukan, ketepatan lebih menekan pada kerasionalan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dan dirasakan oleh publik. Hubungan antara evaluasi ketepatan dan implementasi dalam penanganan banjir di

desa Lamanela dipaparkan sebagai berikut:

1) Komunikasi

Ketepatan komunikasi lebih menekan pada penyampaian dari pemerintah tentang resiko atau adanya pemberitahuan tentang akan terjadinya bencana, untuk mendapatkan informasi, maka peneliti mewawancarai informan dengan mengajukan pertanyaan apakah komunikasi yang dilakukan pemerintah sudah dilakukan dalam penanganan, berdasarkan pertanyaan tersebut informan menjawab

“ketepatan informasi dari pemerintah desa ataupun pemerintah kecamatan sendiri dalam penanganan banjir desa Lamanela dinilai masih kurang tepat, hal ini dibuktikan dengan dalam penanganan sebelum terjadinya banjir pemerintah tidak memberitahukan atau mensosialisasikan lebih dulu sebelum terjadinya banjir, tetapi sosialisasi usaha penanganan setelah terjadinya banjir sudah tepat” (hasil wawancara 5 September 2021).

Penyampain komunikasi sebelum terjadinya bencana adalah hal yang penting karena dengan adanya pemberitahuan lebih awal dapat membantu masyarakat sehingga dapat mempersiapkan agar dapat mengurangi resiko yang setelah terjadinya banjir (Anosimus, 2014).

2) Sumberdaya

Ketepatan sumberdaya lebih menekan pada usaha yang dilakukan pemerintah dalam penanganan yang dilakukan pemerintah, untuk memperoleh informasi maka peneliti mewawancarai informan dengan mengajukan pertanyaan Apakah sumberdaya baik itu sumberdaya manusia, anggaran dan sarana prasarana sudah tepat dan manfaatnya dapat dirasa semua oleh masyarakat Lamanela, berdasarkan pertanyaan tersebut maka informan menjawab

“Ketepatan yang diberikan pemerintah dalam penganannya sudah baik, hal ini dibuktikan dengan bantuan sumberdaya manusia dan anggaran sudah sangat membantu dalam penaganan banjir dan manfaatnya dirasakan oleh masyrakat Lamanela” (hasil wawancara, 5 September 2021).

3) Disposisi

Ketepatan disposisi lebih menekan pada kinerja personil dalam penanganan banjir, untuk memperoleh informasi maka peneliti mewawancarai informan dengan mengajukan pertanyaan, apakah dalam penanganan banjir pengangkat personil dapat mempengaruhi penanngan banjir, berdasarkan pertanyaan tersebut maka informan menjawab

“Dengan adanya pengangkat personil dalam penanganan banjir dapat membantu masyarakat karena dengan adanya bantuan personil yang datang pada lokasi dapat menangani evakuasi korban lebih cepat” (hasil wawancara, 5 September 2021).

4) Birokrasi

Untuk memperoleh keterkaitan ketepatan dengan birokrasi peneliti mewawancarai informan dengan mengajukan pertanyaan apakah birokrasi yang dilakukan pemerintah sudah tepat atau belum, berdasarkan pertanyaan tersebut informan menjawab “birokrasi yang dilakukan pemerintah sudah tepat karena dengan adanya kerjasama dari pusat sampai didesa penanganan banjir serlah kejadian dapat dirasakan oleh masyarakat Lamanela (hasil wawancara, 5 September 2021).

6. Responsivitas

Responsivitas merupakan tanggapan sasaran kebijakan publik terhadap pelaksana suatu kebijakan. Hubungan antara evaluasi responsivitas dan implementasi dalam pengananan banjir di

desa Lamanela dipaparkan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Keberhasilan suatu kebijakan dinilai baik jika adanya respon atau tanggapan dari masyarakat tentang suatu kebijakan yang telah ditetapkan, untuk memperoleh informasi maka peneliti mewawncarai informan dengan mengajukan pertanyaan adanya sosialisasi apakah membawa dampak bagi masyarakat Lamanela, berdasarkan pertanyaan tersebut informan menjawab,

“komunikasi dengancara mensosialisasikan penanganan banjir yang dilakukan pemerintah belum semua dipahami oleh masyarakat Lamnela, hal ini dibuktikan dengan semua masyrakat Lamanela tetap melakukan ritual adat untuk mengurangi resiko banjir” (hasil wawancara, 6 September 2021).

Responsivitas merupakan evaluasi yang berfungsi untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap kebijakan publik, jika suatu kebijakan tidak memuaskan masyarakat maka kebijakan tersebut dinilai tidak mencapainya tujuan impleemntasi (Hikmah, 2014).

b. Sumberdaya

Responsivitas sumberdaya menekan pada tanggapan pemerintah dengan kejadian, untuk memperoleh informasi maka peneliti mewawancarai dengan mengajukan pertanyaan apakah respon yang berikan pemerintah sudah memuaskan kebutuhan masyarakat atau belum, berdasarkan pertanyaan tersebut maka jawaban dari informan.

“Untuk respon pemerintah terhadap bencana banjir desa Lamanela sudah dianggap sangat baik, dengan adanya bantuan sumberdaya manusia, bantuan-bantuan lainnya penganan banjir dapat cepat”.

Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dilihat dari tanggapan masyarakat

tetapi adanya respon pemerintah juga mempengaruhi kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Disposisi

Untuk memperoleh informasi penanganan yang dilakukan pemerintah, maka peneliti mewawancarai informan dengan mengajukan pertanyaan apakah disposisi yang dilakukan pemerintah misalnya pengangkat personil mempengaruhi tanggapan dalam penanganan banjir, berdasarkan pertanyaan tersebut maka informan menjawab

“Respon/ tanggapan pemerintah sudah memuaskan kebutuhan/kepentingan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan bantuan personil yang bertanggung jawab dalam setiap tugas yang ditetapkan selama proses penanganan” (hasil wawancara, 6 September 2021).

c. Birokrasi

Untuk memperoleh informasi yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai informan dengan mengajukan pertanyaan apakah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah desa Lamanela sudah memuaskan masyarakatnya, berdasarkan pertanyaan tersebut informan menjawab

“tanggungjawab yang diberikan pemerintah kecamatan kepada pemerintah desa lamanela dinilai sangat memuaskan, hal ini dibuktikan dengan bantuan-bantuan yang diberikan dari kecamatan langsung dibagikan kepada masyarakat Lamanela” (hasil wawancara, 6 September 2021).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dari peneliti yang telah dipaparkan sebelumnya maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Evaluasi dari implementasi yang dilakukan pemerintah desa

Lamanela dalam Penanganan Banjir :

- a. Efektivitas dan efisiensi oleh pemerintah desa Lamanela dinilai masih cukup baik, walaupun dalam penyampaian komunikasi yang dilakukan pemerintah baik dari Desa maupun pemerintah Daerah tidak semuanya dipahami oleh masyarakat Lamanela, sumberdaya yang diberikan untuk membantu penanganan dinilai cukup memadai dari sumberdaya anggaran dana untuk membantu kerugian masyarakat Lamanela yang berikan oleh pemerintah daerah dapat diolah oleh pemerintah desa, dan untuk sarana dan prasarana meskipun untuk alat-alat berat untuk membantu pencarian korban tidak memadai. Hal ini menunjukkan berbagai usaha dari implelementasi yang dilakukan telah cukup sebanding dengan hasil yang diterima oleh masyarakat.
- b. Ketepatan dalam menjawab masalah dalam implementasi penanganan bencana banjir desa Lamanela dinilai cukup bagus, karena dengan adanya disposisi pengangkat personil yang tepat dapat membantu penanganan dengan tepat sehingga dirasakan oleh masyarakat Lamanela, tetapi untuk birokrasi yang dilakukan pemerintah dinilai belum tepat hal ini dibuktikan dengan belum adanya penanggungjawab untuk desa belum memadai sehingga penanganannya belum secara optimal.
- c. Pemerataan dan kecukupan dari implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan bencana banjir desa Lamanela, sumberdaya yang diberikan pemerintah sudah cukup merata, dan untuk kepuasan terhadap sumberdaya yang diberikan

pemerintah sudah dinilai sangat cukup. sehingga impelementasi yang telah dilakukan manfaatnya telah didistribusikan sudah merata kepada masyarakat.

- d. Responsivitas dari implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan bencana banjir desa Lamanela, dinilai sudah bagus hal ini dibuktikan dengan adanya respon dari berbagai pihak sehingga waktu penanganannya cepat dan tepat.

2. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti agar penanganan banjir dapat mencapai tujuan adalah:

- a. Adanya peningkatan kerjasama/komunikasi antara kota FLOTIM dan kecamatan dan dari kecamatan baru disosialisasikan kepada desa-desa sehingga penanganan sebelum terjadinya bencana dapat mengurangi dampak resiko banjir, adanya birokrasi yang dilakukan pemerintah FLOTIM harus lebih optimal sehingga dalam penanganan banjir untuk desa- desa yang mungkin diperdiksi akan terjadi banjir ataupun bencana lainnya yang dapat terjadi ada penanggungjawabnya. Sumberdaya manusia yang meliputi pengangkat personil sehingga adanya rasa tanggungjawab yang lebih tinggi dalam penanganan bencana.
- b. Kepercayaan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap kebudayaan misalnya kebudayaan mempercayai air belerang tidak boleh dibawah kemana-mana sebaiknya di kurangkan, karena dilihat dari kondisi wilayah desa Lamanela dapat ditemukan hasil penyebab banjir karena curah hujan dan kondisi wilayah.

Daftar Pustaka

- Berita Satu. (2020). 3.731 Bencana di Indonesia Didominasi Hidrometeorologi. <https://www.beritasatu.com/feriawanhidayat/nasional/592953/3731-bencana-di-indonesiadidominasi-hidrometeorologi>
- Dibyosaputro, P dan W. Suprpto. 1995. Pemetaan Longsor Kabupaten Kulonprogo. Laporan Penelitian. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University.
- Dwiyanto, indiahono. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy. Yogyakarta: Gava Media
- Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy Fourth Edition. New jersey: prentice hall.
- Grindle Merille S. 1980 Policy Making Implementation The Third Word. Pricention University press new jesye.
- Mulyadi, Deddy. 2015.Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Bandung:Alfabeta
- Nasution, Ilman. 2017. Evaluasi Implementasi Kebijakan Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Studi Pada Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II). Laporan Penelitian:Universitas Riau. JOM FISIP, VOL 4 No.2
- Sooly , D.A., Marchbank, A., McMahan, K., Dickinson, J.R., Rogers, H.J.

- and Francis, D. (2007) A WEE1 homologue from *Arabidopsis thaliana*. *Planta*, 215, 518–522.
- Soulisa, Nurmala Sari. 2017. Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Pada Desa Kecamatan Palu. *Jurnal Katalogis*. Vol. 5, No. 1. Hal: 91-98
- Sudjatmiko, S., M. Chozin, Z. Mukhtar and N. Setyowati. 2009. Closed Farming System : An Alternative Poverty Eradication in Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Province, Indonesia. *Proceeding 4th International Seminar of Regional Network on Poverty Eradication*. 23-25 October 2009.
- Tun Lin Moe dan Patrhanarakul P. 2006 “ An intergrated apporoach to natural disanser management” *Disanset Prevention and Management Journal*. Vol. 15 No. 3. Hal: 396-413.
- Undang-undang Repbulik Indonesia No. 24 Tahun 2007 .Tentang Penanggulangan Bencana Alam
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.